

PENGARUH DANA BAGI HASIL DAN INFRASTRUKTUR TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA MANADO

Oleh :

*Franklien Senduk, Daisy S.M. Engka, George V.M Kawung**Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Magister Ilmu Ekonomi
Universitas Sam Ratulangi***ABSTRAK**

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Daerah. Semangat desentralisasi yang melimpahkan kewenangan pengelolaan keuangan kepada pemerintah daerah, khususnya tingkat kota atau kabupaten membuat daerah mencari cara mendapatkan pendapatan daerah yang sah untuk mendukung program pembangunan dalam bentuk Infrastruktur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, di tengah gencarnya program pembangunan perekonomian di berbagai sektor, sehingga berimplikasi kepada pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak luas pada penambahan pendapatan masyarakat sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat secara positif. Perangkat Daerah yang terkait di dalam proses penerimaan daerah di pacu untuk meningkatkan peluang penerimaan daerah dari semua sektor pendapatan daerah. dengan paradigma pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang harus diimplementasikan oleh pemerintah daerah. Fakta empiris (empirical evidents) menunjukkan penerapan otonomi daerah memberi keleluasaan kepada daerah untuk mendapatkan sumber sumber pendapatan yang sah seperti pajak dalam bentuk Dana Bagi Hasil baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi dan retribusi daerah dengan luasnya kewenangan pemerintah daerah.

Kata kunci : *Dana Bagi Hasil, Infrastruktur dan Pertumbuhan Ekonomi*

ABSTRACT

Regional Finance is all Regional rights and obligations that can be valued with money and everything in the form of money and goods related to the implementation of the rights and obligations of the Region. The spirit of decentralization that delegated financial management authority to local governments, especially at the city or district level, made the regions look for ways to obtain legitimate regional revenues to support development programs in the form of infrastructure to improve community welfare amid the intense economic development programs in various sectors, thus implicating development sustainable and have a broad impact on increasing community income so that economic growth increases positively. Regional Apparatus that is related to the process of regional revenue is encouraged to increase the opportunities for regional revenues from all regional income sectors. with a sustainable development paradigm that must be implemented by the regional government. Empirical evidence shows the application of regional autonomy which gives freedom to the regions to obtain legitimate sources of income such as taxes in the form of Revenue Sharing Funds from both the Central and Provincial Governments and regional retributions with the broad authority of the regional government.

Keywords: *Revenue Sharing Funds, Infrastructure and Economic Growth*

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan harus dilihat sebagai proses multidimensi yang mencakup tidak hanya pembangunan ekonomi, namun juga mencakup perubahan-perubahan utama dalam struktur sosial, perilaku, dan kelembagaan. Tujuan utama pembangunan ekonomi selain berupaya untuk menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, pembangunan harus pula berupaya untuk menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran atau upaya menciptakan kesempatan kerja bagi penduduk sebab dengan kesempatan kerja masyarakat akan memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Todaro, 1997: 7-14).

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumberdaya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas kolusi, korupsi dan nepotisme. Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai sub sistem negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Sebagai daerah otonom, Kabupaten/Kota untuk bertindak sebagai “motor” sedangkan pemerintah Propinsi sebagai koordinator mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya yang ada melalui suatu pola kemitraan untuk menciptakan lapangan kerja atau kesempatan kerja baru dan merangsang pertumbuhan ekonomi. Pembangunan yang dilakukan harus dapat menggali seluruh potensi yang ada pada masing-masing daerah untuk diolah sehingga bermanfaat secara riil. Potensi-potensi tersebut terdiri potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, potensi kultural dan potensi-potensi lainnya yang harus diupayakan dan diberdayakan secara optimal. Penggalian segala potensi yang ada merupakan hal yang sangat penting dalam rangka untuk semakin mengembangkan kemampuan dan kemandirian masing-masing daerah.

Pertumbuhan ekonomi daerah berkaitan erat dengan peningkatan produksi barang dan jasa, yang diukur dengan besaran dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi itu sendiri merupakan suatu proses peningkatan pendapatan perkapita daerah dalam jangka panjang.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah

1. Apakah terdapat pengaruh Dana Bagi Hasil dan Infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Manado?
2. Apakah terdapat pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Manado?
3. Apakah terdapat pengaruh Infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Manado?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui pengaruh Dana Bagi Hasil dan Infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Manado.
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Manado.
3. Untuk mengetahui pengaruh Infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Manado.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat :

- Sebagai bahan masukan dan informasi bagi para investor dan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulut terlebih khusus masyarakat kota Manado.
- Sebagai bahan informasi bagi pemerintah (instansi terkait) dan pihak-pihak yang memerlukannya
- Sebagai referensi atau masukan bagi peneliti, untuk penelitian lebih lanjut.

LANDASAN TEORI

Teori Ekonomi Pembangunan.

Pembangunan merupakan proses transformasi yang dalam perjalanan waktu ditandai oleh perubahan struktural yaitu perubahan pada landasan kegiatan ekonomi maupun pada kerangka susunan ekonomi masyarakat yang bersangkutan (Sumitro 1998 : 73).

Pembangunan bukanlah semata fenomena ekonomi, pembangunan harus dipahami sebagai salah satu proses yang berdimensi jamak yaitu melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, seluruh rakyat dan kelembagaan nasional serta percepatan pertumbuhan ekonomi, pengagguran ketidakmerataan kemiskinan absolut (Todaro, 2000 : 29).

Dalam hubungan ini dapat dikemukakan beberapa persyaratan pembangunan ekonomi yang dikemukakan oleh Jhingan (2001 :10) sebagai berikut:

- a. Syarat utama bagi pembangunan ekonomi bahwa proses pertumbuhan harus bertumpuh pada perekonomian di dalam negeri.
- b. Menghilangnya ketidaksempurnaan pasar.
- c. Perubahan struktural.
- d. Pembentukan modal tabungan untuk tujuan investasi dalam barang-barang modal dan perusahaan.
- e. Kriteria investasi.
- f. Adminstrasi.

Pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan penduduk sebagai masyarakat meningkat dalam jangka panjang.

Pembangunan ekonomi perlu dipandang sebagai suatu proses supaya saling berkaitan dalam hubungan saling mempengaruhi antara faktor-faktor yang menghasilkan pembangunan dapat dilihat selanjutnya. Pembangunan ekonomi perlu dipandang sebagai kenaikan dalam pendapatan perkapita, karena kenaikan ini merupakan suatu pencerminan dari timbulnya perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi (Sukirno, 1997 :13-14).

Untuk melihat laju pembangunan suatu negara dan perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan pendapatan nasional dan pendapatan perkapita dari masa ke masa perlu ditentukan. Pendapatan nasional merupakan nilai produksi barang dan jasa-jasa yang dihasilkan dalam suatu perekonomian dalam satu tahun. Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo menyuguhkan berbagai pembangunan infrastruktur. Berdasarkan Perpres Nomor 58 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, tercatat ada 248 proyek infrastruktur strategis nasional di berbagai wilayah Indonesia mulai dari jalan tol, stasiun kereta api, bandara, pelabuhan, rusun, kilang minyak, Terminal LPG, SPAM, bendungan dan irigasi, peningkatan jangkauan *broadband*, *techno park*, Kawasan Ekonomi Khusus, *smalter*, dan pembangkit listrik.

Banyaknya proyek infrastruktur yang dicanangkan pemerintah tentulah memerlukan banyak lahan ,dan mempengaruhi kualitas lingkungan hidup. Dalam terminologi ekonomi lingkungan, pemanfaatan sumberdaya alam untuk kegiatan pembangunan haruslah bersifat normatif dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta menjamin keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup.

Selain itu, sangatlah penting untuk memahami hakikat pembangunan perekonomian Indonesia yang telah digariskan oleh konstitusi sebagaimana termaktub dalam Pasal 33 UUD 1945. Perekonomian nasional disusun atas usaha bersama, berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi dan asas kekeluargaan. Bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur.

Dalam berbagai kasus pembangunan, hak-hak masyarakat yang telah dijamin konstitusi tersebut dieleminasi oleh pemerintah baik itu melalui legal instrumen maupun kriminalisasi langsung terhadap masyarakat melalui alat negara (TNI/Polri). Pembangunan tidak lagi memperhatikan hukum yang hidup di dalam masyarakat sebagai bagian dari kearifan lokal, masyarakat pinggiran termarjinalkan, hingga terkungkung di dalam jeruji besi. Praktik pembangunan yang demikian sangatlah bertolak belakang dengan prinsip demokrasi ekonomi dalam sistem perekonomian nasional yang mengandung makna kerakyatan, artinya pembangunan nasional itu adalah pembangunan berbasis negara dan rakyat (*state based devolepment*). Model pengambilan keputusan dalam pembangunan seharusnya *participatory democracy*, bukan *elite democracy*.

Keterlibatan masyarakat dalam setiap pembangunan merupakan hak asasi warga negara yang telah dijamin oleh konstitusi sebagaimana termaktub dalam Pasal 28C ayat (3) UUD 1945. Bentuk keterlibatan masyarakat mulai dari tahap pemberitahuan informasi, konsultasi, dialog, tukar pikiran, musyawarah, menyatakan pendapat, dan interaksi semuanya merupakan hak asasi warga negara yang dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 E ayat (3) dan 28F UUD 1945.

Setiap kegiatan pembangunan haruslah bersifat *pareto superior* (membangun menguntungkan segala pihak terutama masyarakat), bukan *pareto optimal* (membangun mengorbankan orang lain). Tujuan utama pembangunan adalah untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan warga negara Indonesia. Nilai-nilai penting dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah untuk; pertama, peran masyarakat adalah sebagai suatu strategi. Maksudnya, peran serta masyarakat merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan masyarakat (*public support*).

Kedua, peran masyarakat sebagai suatu kebijakan. Masyarakat merupakan subjek yang potensial dikorbankan atau terkorbankan oleh pembangunan. Oleh sebab itu, masyarakat memiliki posisi tawar untuk mengkonsultasikan haknya (*right be to consulted*) yang menjadi dasar kebijakan oleh pemerintah. Ketiga, peran serta masyarakat sebagai alat komunikasi. Peran serta masyarakat ditujukan untuk mendapatkan informasi untuk pengambilan keputusan-keputusan pemerintah. Keempat, peran serta masyarakat sebagai alat penyelesaian sengketa. Pada tahap ini peran serta masyarakat didayagunakan untuk meredam konflik melalui upaya pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Sebagai penutup, bagian terpenting dalam pembangunan Indonesia adalah membangun Indonesia haruslah dimulai dari membangun jiwa warga negara Indonesia, barulah membangun badannya (fisik).

Infrastruktur

Pengertian Infrastruktur | Inilah arti infrastruktur yang sering dijadikan referensi untuk mengartikan apa itu infrastruktur. Tentu saja mendengar istilah infrastruktur sudah tak asing lagi di telinga kita karena banyak didengar di radio, internet dan televisi bagaimana pemerintah berupaya untuk memelihara dan membangun infrastruktur untuk dapat meningkatkan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Kalau mendengar kata infrastruktur maka sebagian besar dari kita akan membayangkan fasilitas-fasilitas umum bersifat fisik seperti jembatan, bandara, rumah sakit, bendungan, pelabuhan, jalan

raya dan masih banyak lagi lainnya. Apakah infrastruktur terbatas pada fasilitas saja? Nah, untuk lebih lengkap dan jelas mari kita melihat pengertian infrastruktur itu sendiri.

Infrastruktur Transportasi

Infrastruktur Transportasi adalah infrastruktur yang menyupport sekaligus bermanfaat untuk kelangsungan para pengguna alat transportasi. Infrastruktur transportasi yang baik seharusnya dapat memberikan kenyamanan sekaligus kenyamanan untuk para penumpang. Contoh infrastruktur transportasi yaitu pelabuhan, jalan tol, jalan-jalan raya, bandara, rambu lalu lintas, stasiun dan sebagainya. Contohnya jalan raya, dengan adanya pembangunan jalan raya yang lengkap dan baik maka tentu saja sangat berarti untuk kelancaran transportasi sehingga hasil pertanian pun dapat didistribusikan, para karyawan dapat ke kantor secara mudah, distribusi barang pun dapat mencapai pelosok daerah, anak-anak bisa bersekolah dengan mudah, dan masih banyak lagi manfaatnya yang bisa kita rasakan. Bisa kita bayangkan kalau jalan raya hancur atau rusak, begitu banyak kegiatan masyarakat menjadi terhambat. Pendek kata, bahwa infrastruktur jalan raya berarti jalan raya tersebut dibuat semata-mata untuk dipakai oleh masyarakat luas. Tidak hanya orang-orang tertentu.

Ada juga infrastruktur yang dibangun oleh kelompok atau perorangan tertentu. Contohnya perusahaan pertambangan yang membangun fasilitas untuk dapat menunjang kelancaran kegiatan perusahaan seperti sistem kelistrikan, jraingan komputer, gedung dan masih banyak lagi yang lainnya. Apalagi untuk perusahaan-perusahaan besar yang mempunyai kawasan yang cukup luas, biasanya mereka membangun jalan raya, swalayan, penginapan karyawan dan lain-lain. Ada tiga jenis infrastruktur yakni infrastruktur lunak, infrastruktur keras non fisik dan infrastruktur keras. Kita sudah mengetahui secara baik mengenai apa itu infrastruktur keras yakni infrastruktur yang mempunyai bentuk fisik dan paling banyak berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Adapun contohnya jalan raya, dermaga, bandara dan lain-lain. Infrastruktur keras non fisik sesuai penamaannya tak mempunyai bentuk fisik yang nyata akan tetapi ikut mendukung infrastruktur keras yang lainnya. Contohnya, jaringan komunikasi seperti internet dan telepon, ketersediaan air bersih, pasokan listrik, pasokan energi dan lain-lain. Kita tak bisa melihat pasokan listrik secara nyata, akan tetapi kita sangat memerlukan pasokan listrik yang disalurkan lewat kabel listrik yang dipasang pada seluruh kota. Sementara itu, infrastruktur lunak mencakup lembaga-lembaga pemerintahan dan kerangka institusional. Selain memerlukan jembatan dan jalan raya, kita sebagai masyarakat pasti memerlukan sistem yang mengelola pemerintahan dan kepentingan umum seperti kepolisian untuk ketertiban masyarakat, kantor camat, lurah untuk urusan kemasyarakatan, pelayanan kantor pos dan masih banyak lagi yang lainnya.

Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil Pajak kendaraan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi yang dialokasikan kepada daerah kabupaten dan kota dalam wilayah provinsi berdasarkan angka presentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah terutama insfrastruktur Jalan. Pajak kendaraan bermotor dibayar oleh masyarakat pengguna kendaraan bermotor pada Unit Pengelola Teknis pada kabupaten dan kota tapi dikelola langsung oleh Pemerintah provinsi melalui Badan Pendapan Daerah (BAPENDA). Dalam rangka menciptakan suatu sistem perimbangan keuangan yang proporsional, demokratis, adil, dan transparan berdasarkan atas pembagian kewenangan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka telah diundangkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang antara lain menegaskan prinsip-prinsip dasar perimbangan keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah. Dana Perimbangan merupakan pendanaan Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bertujuan untuk membantu Daerah dalam

mendanai kewenangannya, mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara Pusat dan Daerah, serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar-Daerah. Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Ketiga komponen Dana Perimbangan ini merupakan sistem transfer dana dari Pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang utuh. Dana Bagi Hasil merupakan salah satu komponen dana perimbangan yang bersumber dari Pajak dan Sumber Daya Alam. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penghasilan (PPh). Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya- sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Pengertian lain pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses. Yaitu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, ahli ilmu pengetahuan, dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru. Jadi setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumberdaya-sumberdaya yang ada harus mampu menaksir potensi sumberdaya-sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah.

Pajak

Pajak merupakan salah satu sarana pemerataan pendapatan warga negara dan sumber dana pembangunan negara bagi pemerintah. Jadi di jangka panjang masyarakat umum dapat menikmati efeknya dari pembangunan tersebut. Seperti contohnya jika Anda membayar pajak jalan raya maka Anda akan menikmati manfaatnya dari perbaikan jalan raya di daerah Anda.

Jadi selain jasa timbal balik bersifat tidak langsung, pemungutan pajak dilakukan berdasarkan norma-norma hukum dan bersifat memaksa sehingga penolakan untuk membayar pajak atau menghindarinya pada umumnya termasuk pelanggaran hukum. Oleh sebab itu, setiap rakyat wajib membayarkan pajak sesuai dengan aturannya. Setiap negara telah memberlakukan aturan yang memaksa kepada setiap warganya untuk membayar pajak. Bahkan, pajak telah menjadi andalan negara dalam pembangunan nasional masing-masing negara. Tanpa adanya pajak, maka sulit bagi negara untuk membangun dan mensejahterakan rakyatnya secara adil. Alasan inilah yang menimbulkan kedudukan pajak sangat penting dan hukumnya wajib bagi setiap warga negara di negara manapun mengingat manfaat pajak yang sangat penting bagi negara. Di Indonesia Pajak merupakan sektor pemasukan terbesar kas Negara, Penerimaan Negara dari sektor pajak memegang peranan yang sangat penting untuk kelangsungan system Pemerintahan suatu Negara.

Inflasi

Inflasi merupakan kenaikan didalam tingkat harga umum (Samuelson dan Nordhaus, 2004). Secara sederhana inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus.

Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya.

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya inflasi antara lain penurunan nilai tukar mata uang, permintaan yang tinggi terhadap suatu barang, bertambahnya uang yang beredar, dan lain sebagainya.

- Inflasi karena permintaan (*Demand Pull Inflation*)
- Inflasi karena bertambahnya uang beredar
- Inflasi karena kenaikan biaya produksi (*Cost push inflation*)
- Inflasi Campuran (*Mixed Inflation*)
- Inflasi ekspektasi (*Expected Inflation*)
- Kekacauan ekonomi dan politik

➤ **Teori Kuantitas**

Menurut teori ini, inflasi disebabkan oleh jumlah uang beredar dan psikologi (harapan) masyarakat mengenai kenaikan harga di masa datang.

➤ **Teori Keynes**

Menurut Keynes, inflasi terjadi karena masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuannya (secara ekonomis).

➤ **Teori Strukturalis**

Teori ini memberikan tekanan pada kekuatan dari struktur perekonomian seperti yang terjadi di Negara-negara berkembang.

Investasi

Menurut Sukirno (2004:435) pengertian investasi yaitu pengeluaran atau pembelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Pengertian lain dari investasi adalah suatu aktiva yang digunakan perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan melalui distribusi hasil investasi (seperti pendapatan bunga, "royalty", deviden, pendapatan sewa dan lain-lain), untuk apresiasi nilai investasi, atau untuk manfaat lain bagi perusahaan yang berinvestasi, seperti manfaat yang diperoleh melalui hubungan dagang. Investasi adalah suatu komponen dari PDB dengan rumus $PDB = C + I + G - (X - M)$. Peran investasi di Sulut sangat berperan besar dalam menumbuhkan perekonomian di daerah karena *multiplier effect* dari investasi akan meningkatkan produktivitas, memacu pertumbuhan dan berpeluang meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat hasil pembangunan yang telah dilakukan dan juga berguna untuk menentukan arah pembangunan dimasa yang akan datang. Pertumbuhan Ekonomi mutlak harus ada sehingga pendapatan masyarakat akan bertambah, dengan demikian tingkat kesejahteraan masyarakat diharapkan akan meningkat. Simon Kuznets dalam Todaro (2000:115) menyatakan bahwa "*a country's economic growth as long term rise in capacity to supply increasing diverse economic goods to its population, this growing capacity based on advancing technology and the institutional and ideology adjustment that it demand.*"

Hipotesis :

Berdasarkan latar belakang dan landasan teori yang telah di kemukakan maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1. Diduga Dana Bagi Hasil dan Infrastruktur berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Manado.
2. Diduga Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Manado.
3. Diduga Infrastruktur berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Manado.

2. METODE PENELITIAN**Data dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data Sekunder adalah data yang di ambil dari instansi-instansi yang terkait dalam penelitian ini yaitu :

1. Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Manado
2. Badan Keuangan & Aset Daerah Kota Manado
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kota Manado
4. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Manado
5. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Pemprov. Sulawesi Utara

Jenis-jenis data sekunder antara lain :

- Realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil kota Manado.
- Realisasi Anggaran Infrastruktur di Kota Manado
- Pertumbuhan Ekonomi Kota Manado

Metode Analisis Data

- Untuk melihat pengaruh Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Provinsi Sulawesi Utara terhadap Peningkatan Infrastruktur Kota Manado digunakan analisa regresi berganda. Metode regresi linier sederhana Model dasar yang digunakan dalam penelitian ini dapat dispesifikasikan sebagai berikut :
- Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut :
- $Y = b_0 + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e_i$
- Dimana:
- Y = Pertumbuhan ekonomi
- X_1 = Dana Bagi Hasil
- X_2 = Infrastruktur
- B_{1-2} = Koefisien parsial untuk masing – masing variabel X_{1-2}
- Formulasi model ini merupakan regresi yang berbentuk linier dimana bentuk ini secara teoritis variabel tidak bebas yang akan diteliti mempunyai kecenderungan hubungan yang linier terhadap masing-masing variabel bebasnya.
- Selanjutnya untuk mengetahui elastisitas dari pengaruh investasi /belanja modal dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi, maka model persamaan Regresi berganda tersebut di transformasi kedalam bentuk log, sehingga persamaan regresi berganda menjadi :
- $Y = b_0 + \text{Log } b_1 X_1 + \text{Log } b_2 X_2 + e_i$

o **Uji Asumsi Klasik**

Uji Autokorelasi

Uji ini merupakan pengujian asumsi dalam regresi di mana variabel dependen tidak berkorelasi dengan dirinya sendiri. Maksud berkorelasi dengan dengan dirinya sendiri adalah bahwa nilai dari variabel dependen atau variabel terikat tidak berhubungan dengan nilai variabel itu sendiri, baik nilai periode sebelumnya atau nilai periode sesudahnya.

Uji Multikolinieritas

Asumsi multikolinieritas menyatakan bahwa variabel independen harus terbebas dari gejala multikolinieritas. Gejala multikolinieritas adalah gejala korelasi antar variabel independen. Gejala ini ditunjukkan dengan korelasi yang signifikan antar variabel independen. Dengan kata lain multikolinieritas berarti adanya hubungan linear yang sempurna atau pasti diantara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dari model regresi.(Gujarati, 2005 : 157).

Uji Heteroskedastisitas

Salah satu asumsi dalam regresi linear klasik adalah bahwa gangguan (disturbance) ui yang muncul dalam fungsi regresi populasi adalah homoskedastik yaitu semua gangguan tadi mempunyai varians yang sama. (Gujarati 2005, : 177).

o **Uji Normalitas Data**

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik adalah berdistribusi normal atau mendekati normal.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Analisis Deskriptif

Tabel. Deskripsi Dana Bagi Hasil

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Dana Bagi Hasil	15	10.73	11.08	10.9055	.13062
Valid N (listwise)	15				

Sumber : Olah Data SPSS 20, 2019

Tabel menunjukkan Deskripsi Dana Bagi Hasil. Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa nilai minimum untuk Dana Bagi adalah sebesar 10.73 dan nilai maksimum adalah 11.08. Nilai rata-ratanya adalah sebesar 10.9055.

Tabel. Deskripsi Infrastruktur

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Infrastruktur	15	11.44	11.53	11.4849	.03131
Valid N (listwise)	15				

Sumber : Olah Data SPSS 20, 2019

Tabel menunjukkan Deskripsi Infrastruktur. Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa nilai minimum untuk Infrastruktur adalah sebesar 11.44 dan nilai maksimum adalah 11.53. Nilai rata-ratanya adalah sebesar 11.4849.

Tabel. Deskripsi Pertumbuhan Ekonomi

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pertumbuhan Ekonomi	16	6.01	6.32	6.1860	.13126
Valid N (listwise)	16				

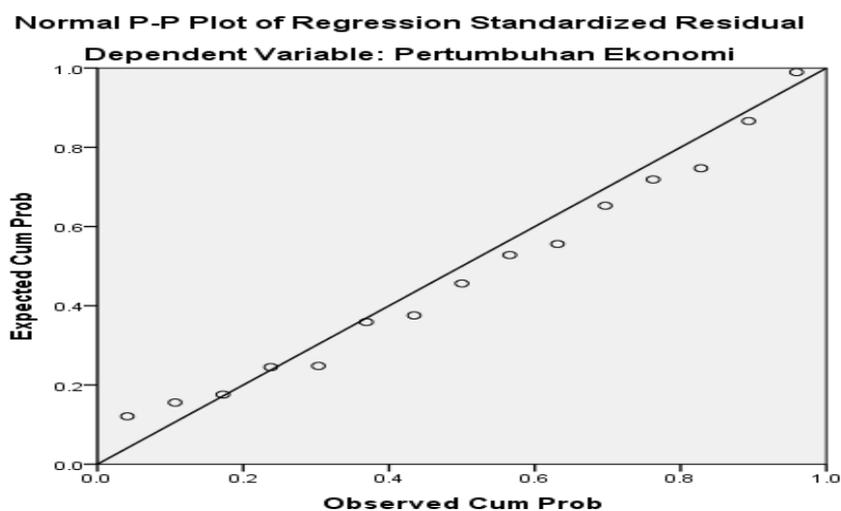
Sumber : Olah Data SPSS 20, 2019

Tabel menunjukkan Deskripsi Pertumbuhan Ekonomi. Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa nilai minimum untuk Pertumbuhan Ekonomi adalah sebesar 6,01 dan nilai maksimum adalah 6,32. Nilai rata-ratanya adalah sebesar 6,186

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk menguji apakah model regresi mempunyai distribusi normal atau tidak. Mode regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal.



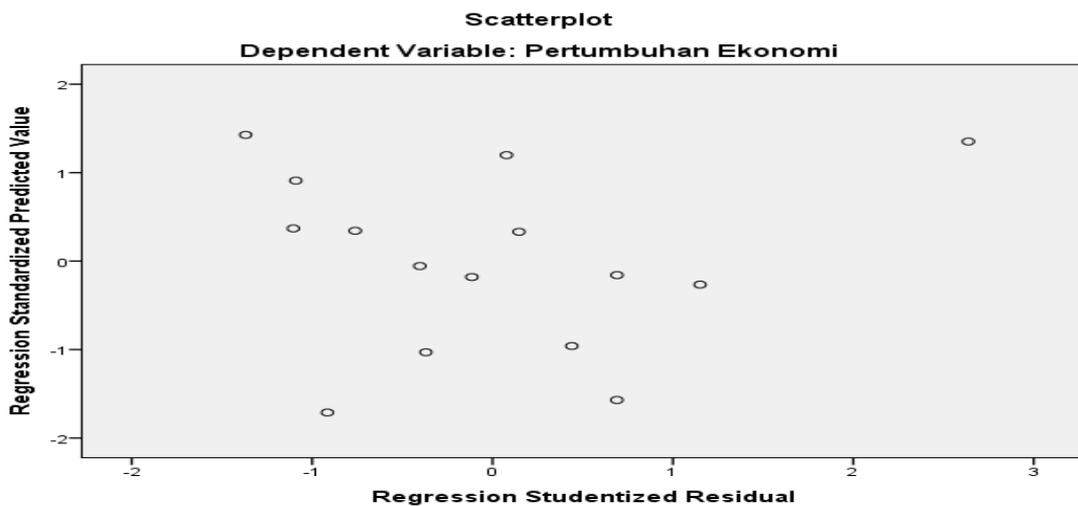
Sumber : Olah data SPSS 20, 2019

Gambar 4.1 Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Gambar 4.1 menunjukkan bahwa pernyataan bahwa tidak terdapat masalah pada uji normalitas karena berdasarkan grafik di atas terlihat titik-titik koordinat antara nilai observasi dengan data mengikuti garis diagonal, sehingga dapat disimpulkan bahwa data memiliki data yang berdistribusi normal.

Uji Heterokedastisitas

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah varian dari residual tidak sama untuk semua pengamatan, yang menyebabkan estimator menjadi tidak efisien dan nilai koefisien determinasi akan menjadi sangat tinggi. Jika dari suatu pengamatan tersebut terdapat varian yang berbeda, maka disebut heterokedastisitas.



Sumber : Olah data SPSS 20, 2019

Gambar 4.2 Scatterplot

Gambar 4.2 menunjukkan bahwa uji heterokedastisitas menampakkan titik-titik yang menyebar secara acak dan tidak ada pola yang jelas terbentuk serta dalam penyebaran titik-titik tersebut menyebar dibawah dan diatas angka 0 pada sumbu Y. Hal tersebut mengidentifikasi tidak terjadinya heterokedastisitas pada model regresi, sehingga data layak dipakai.

Uji Mutikolinieritas

Multikolinieritas merupakan suatu situasi dimana beberapa atau semua bebas berkorelasi kuat. Jika terdapat korelasi yang kuat di antara sesama variabel

Tabel. Collinearity Model

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Dana Bagi Hasil	.261	3.835
Infrastruktur	.261	3.835

Sumber : Olah data SPSS 20, 2019

Tabel menunjukkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas jika nilai VIF < 10 Hasil perhitungan menghasilkan nilai dibawah angka 1 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas dalam model regresi tersebut.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel. Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
(Constant)	530.258	199.402
Dana Bagi Hasil PKB	11.108	5.122
Infrastruktur	56.136	21.365

Sumber : Olah data SPSS 20, 2019

Persamaan Regresi $Y = 530,258 + 11,108X_1 + 56,136 X_2$ menggambarkan bahwa variabel bebas (*independent*) Dana Bagi Hasil (X_1) dan Infrastruktur (X_2) dalam model regresi tersebut dapat dinyatakan jika satu variabel independen berubah sebesar 1 (satu) dan lainnya konstan, maka perubahan variabel terikat (*dependen*) Pertumbuhan Ekonomi (Y) adalah sebesar nilai koefisien (b) dari nilai variabel independen tersebut. Konstanta (α) sebesar 530.258 memberikan pengertian bahwa jika Dana Bagi Hasil (X_1) dan Infrastruktur (X_2) secara serempak atau bersama-sama tidak mengalami perubahan atau sama dengan nol (0) maka besarnya Pertumbuhan Ekonomi (Y) sebesar 530,258 satuan.

Jika nilai b_1 yang merupakan koefisien regresi dari Dana Bagi Hasil (X_1) sebesar 11,108 yang artinya mempunyai pengaruh positif terhadap variabel dependen (Y) mempunyai arti bahwa jika variabel Dana Bagi Hasil (X_1) bertambah 1 satuan, maka Pertumbuhan Ekonomi (Y) juga akan mengalami penurunan sebesar 11,108 satuan dengan asumsi variabel lain tetap atau konstan. Jika nilai b_2 yang merupakan koefisien regresi dari Infrastruktur (X_2) sebesar 56,136 yang artinya mempunyai pengaruh positif terhadap variabel dependen (Y) mempunyai arti bahwa jika variabel Infrastruktur (X_2) bertambah 1 satuan, maka Pertumbuhan Ekonomi (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 56,136 satuan dengan asumsi variabel lain tetap atau konstan.

Uji Hipotesis F dan t

Tabel Uji Hipotesis F dan t

Model	Uji t		Uji F	
	t	Sig	F	Sig
Constant				
Dana Bagi Hasil	2.169	.050	3.467	.005 ^b
Infrastruktur	2.628	.022		

Sumber : Olah data SPSS 20, 2019

Tabel dapat dilihat bahwa Dana Bagi Hasil (X_1) memiliki tingkat signifikansi $p\text{-value} = 0,05 \leq 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima atau Dana Bagi Hasil (X_1) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y). Infrastruktur (X_2) memiliki tingkat signifikansi $p\text{-value} = 0,022 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak atau Infrastruktur (X_2) berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y). Hasil analisis didapatkan Uji Simultan (uji F) dengan tingkat signifikan $p\text{-value} = 0,005 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak atau H_a diterima yang berarti bahwa Dana Bagi Hasil (X_1) dan Infrastruktur (X_2) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y).

Koefisien Korelasi Berganda (R) dan Koefisien Determinasi (R²)Tabel. *Model Summary*

Model	R	R Square	Adjusted Square	R	Std. Error of the Estimate
1	.605 ^a	.366	.261		1.27825

Sumber : Olah data SPSS 20, 2019

Tabel dapat dilihat bahwa nilai Koefisien Korelasi Berganda (R) yang dihasilkan pada model 1 adalah sebesar 0.605 artinya mempunyai hubungan kuat. Nilai Koefisien Determinasi (R²) adalah 0,366 atau 36,6% Artinya Dana Bagi Hasil (X₁) dan Infrastruktur(X₂) dapat menjelaskan variasi Pertumbuhan Ekonomi sebesar 36,6% dan sisanya sebesar 63,4% di diterangkan oleh variabel lain.

Pembahasan Penelitian**Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Amanat undang undang yang mengatur pemberian dana bagi hasil buat daerah kabupaten kota yang bersumber baik dari APBN maupun APBD provinsi telah sangat membantu perkembangan kegiatan perekonomian bagi daerah, tidak terkecuali kota Manado. Dengan bertambahnya dana bagi hasil yang didapatkan oleh kota Manado maka bagi pemerintah kota Manado ada lebih banyak program pembangunan infrastruktur yang bisa di bangun. Bagi pengusaha, dengan adanya perkembangan infrastruktur maka akan meningkatkan produksi dan kegiatan operasional usaha lebih efisien lagi. Bagi masyarakat bisa meningkatkan pendapatan sehingga daya beli bertambah sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi di kota Manado yang lebih baik.

Keuangan Daerah atau anggaran daerah merupakan rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) dalam satu periode tertentu. Selanjutnya Anggaran daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah instrument kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) yang dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Kemampuan Keuangan Daerah adalah kemampuan keuangan daerah dalam membiayai urusan-urusan rumah tangga, khususnya yang berasal dari pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli daerah sampai saat ini merupakan sektor yang sangat diharapkan dan diandalkan oleh pemerintah daerah. Dalam menjamin penyelenggaraan otonomi daerah, diperlukan usaha- usaha untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri dengan mengupayakan peningkatan penerimaan PAD. Peningkatan PAD dapat dilakukan dengan meningkatkan penerimaan sumber PAD yang sudah ada maupun dengan menggali sumber PAD yang baru sesuai dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil yang diperoleh pemerintah daerah diharapkan

mampu untuk meningkatkan alokasi Belanja Daerah guna meningkatkan pelayanan publik bagi daerah sebagai tujuan dari desentralisasi.

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Dana Perimbangan sebagai pendukung pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah untuk pencapaian tujuan pemberian otonomi kepada daerah, terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Pada umumnya setiap daerah memiliki sektor unggulan sendiri-sendiri dalam hal keuangan dan hal ini sangat bergantung pada pemerintah daerah itu sendiri dalam menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang ada. Demikian halnya dalam sistem DBH yang bersumber dari pajak dan SDA. Mekanisme bagi hasil SDA dan pajak bertujuan untuk mengurangi ketimpangan vertikal (vertical imbalance) pusat-daerah. Namun, pola bagi hasil tersebut dapat berpotensi mempertajam ketimpangan horizontal (horizontal imbalance) yang dialami antara daerah penghasil dan non penghasil.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara. Artinya peningkatan dana pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara di pengaruhi oleh dana bagi hasil. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Budhi dan Dewi (2015) menemukan hasil bahwa dana bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Infrastruktur sebagai salah satu teknis, fisik, sistem, perangkat keras dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat serta mendukung jaringan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik. Infrastruktur lebih mengarah ke infrastruktur teknis dan fisik yang mendukung jaringan struktur seperti fasilitas jalan, air bersih, perlistrikan, telekomunikasi, pengelolaan limbah, bandara, waduk, tanggul, kanal, kereta api secara fungsional dapat memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat. Seperti adanya jalan yang baik di suatu negara maka dapat memperlancar transportasi pengiriman bahan baku sampai ke pabrik sesuai tujuan. Maka ini disebut infrastruktur yang disediakan pemerintah disebut barang publik, selain itu seperti jalan tol merupakan infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah.

Selain itu, infrastruktur juga memiliki keterkaitan dalam perkembangan wilayah karena ini ciri dari laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Jika suatu daerah memiliki kelengkapan sistem infrastruktur yang lebih baik maka akan memiliki tingkat laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat juga akan lebih baik dan sebaliknya. Hal ini dapat diartikan bahwa infrastruktur sangatlah penting dalam suatu negara karena infrastruktur merupakan salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi.

Tersedianya infrastruktur suatu negara maka dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Selain itu, infrastruktur memiliki posisi yang sangat penting dalam keberadaan perekonomian suatu negara sebagai pendorong produktivitas output dan melakukan kegiatan ekonomi. Namun disisi lain ada dua kendala dalam pengadaan infrastruktur.

Jadi infrastruktur sudah menjadi roda penggerak pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara karena infrastruktur merupakan salah satu kebutuhan dasar fisik untuk jaminan ekonomi dalam bentuk

layanan kepada masyarakat baik dari sektor public maupun privat untuk kesejahteraan, memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat serta perkembangan wilayah menjadi yang lebih baik jika infrastruktur kurang memadai maka akan terjadi masalah dan penurunan dalam laju pertumbuhan ekonomi negara tersebut.

Infrastruktur dapat diartikan sebagai sarana dan prasarana umum. Sarana secara umum diketahui sebagai fasilitas publik seperti rumah sakit, jalan, jembatan, sanitasi, telpon, dan sebagainya. Dalam ilmu ekonomi infrastruktur merupakan wujud dari publik capital (modal publik) yang dibentuk dari investasi yang dilakukan pemerintah. Infrastruktur merupakan suatu wadah untuk menopang kegiatan-kegiatan dalam satu ruang. Ketersediaan infrastruktur memberikan akses mudah bagi masyarakat terhadap sumber daya sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam melakukan kegiatan sosial maupun ekonomi. Dengan meningkatnya efisiensi otomatis secara tidak langsung meningkatkan perkembangan ekonomi dalam suatu wilayah. Sehingga menjadi sangat penting peran infrastruktur dalam perkembangan ekonomi. Infrastruktur mengacu pada fasilitas kapital fisik dan termasuk pula dalam kerangka kerja organisasional, pengetahuan dan teknologi yang penting untuk organisasi masyarakat dan pembangunan ekonomi mereka. Infrastruktur meliputi undang-undang, sistem pendidikan dan kesehatan publik, sistem distribusi dan perawatan air, pengumpulan sampah dan limbah, pengelolaan dan pembuangannya, sistem keselamatan publik, seperti pemadam kebakaran dan keamanan, sistem komunikasi, sistem transportasi, dan utilitas public.

Infrastruktur merupakan sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung, dan fasilitas publik lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi. Dalam hal ini, hal-hal yang terkait dengan infrastruktur tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Sistem lingkungan dapat terhubung karena adanya infrastruktur yang menopang antara sistem sosial dan sistem ekonomi. Ketersediaan infrastruktur memberikan dampak terhadap sistem sosial dan sistem ekonomi yang ada di masyarakat. Maka infrastruktur perlu dipahami sebagai dasar-dasar dalam mengambil kebijakan.

Infrastruktur fisik dan sosial dapat diartikan sebagian kebutuhan dasar fisik pengorganisasian sistem struktur yang diperlukan untuk jaminan ekonomisektor publik dan sektor privat sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan agar perekonomian dapat berfungsi dengan baik.. Istilah ini umumnya merujuk kepada halin frastruktur teknis atau fisik yang mendukung jaringan struktur seperti fasilitas antara lain dapat berupa jalan, kereta api, air bersih, bandara, kanal, waduk, tanggul, pengolahan limbah perlistrikan telekomunikasi, pelabuhan secara fungsional. Selain itu infrastruktur dapat juga mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat, distribusi aliran produksi barang dan jasa. Sebagai contoh bahwa jalandapat melancarkan transportasi pengiriman bahan baku sampai ke pabrik, kemudian berlanjut untuk mendistribusikan ke pasar hingga sampai kepada masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa infrastruktur berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara. Artinya peningkatan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara di pengaruhi oleh infrastruktur. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Heri (2009) menemukan bahwa infrastruktur berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara bersama sama atau simultan dana bagi hasil dan infrastruktur berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi kota Manado.

2. Secara parsial dana bagi hasil berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kota Manado, Menunjukkan hubungan yang positif namun tidak signifikan.
3. Secara parsial infrastruktur berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kota Manado, Menunjukkan hubungan yang positif namun tidak signifikan. Bertambahnya infrastruktur membantu proses kegiatan perekonomian masyarakat lebih mudah dan efisien sehingga dengan sendirinya Pertumbuhan Ekonomi meningkat.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis memberi saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Manado harus memperhatikan faktor dana bagi hasil yang ada untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi.
2. Menambah alokasi dana untuk pengembangan Infrastruktur untuk menunjang kegiatan perekonomian masyarakat sehingga pada gilirannya akan menambah pendapatan masyarakat dan meningkatnya pembangunan daerah.
3. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai rujukan untuk pengembangan serta pendalaman ilmu pengetahuan Ilmu Ekonomi khususnya Pertumbuhan Ekonomi

DAFTAR PUSTAKA

- Afrida Lindia Rahman. 2016.** Analisis Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak dalam Pencapaian Target Penerimaan Pajak (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar)
- Almira Herna Renata. 2016.** Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi pada Kantor Wilayah DjP Jawa Timur I)
- Amelia Westri Aurumasari. 2016.** Efektivitas Pemungutan Pajak melalui Penerbitan Surat Pajak terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Malang. www.neliti.com/journals/jurnal-mahasiswa-perpajakan. Diakses 25 November 2018.
- Andys Dwi Saputra. 2014.** Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah . www.neliti.com/journals/jurnal-mahasiswa-perpajakan. Diakses 25 November 2018.
- Crosby, P. 1979.** *Quality is Free*. Mc-Graw Hill Book Inc. New York.
- Edy, S 2009.** *Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Pertama, Cetakan Pertama*, Penerbit Kencana, Jakarta.
- Farid dan Siswanto. 2011.** *Analisis Laporan Keuangan*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Fiqih Pradana. 2016.** This study is motivated by the revenue receipt of (Motor Vehicle Tax) and (Customs of Motor Vehicle) Profit Sharing of Malang City that is increased and decreased over the period 2010-2014.
- Indriantoro. 2002.** *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen. Cetakan 2*. BPFE-Yogyakarta. Yogyakarta.
- Ivancevich, Konopaske & Matteson. 2002,** *Perilaku Dan Manajemen Organisasi (Alih Bahasa Gina Gania)*, Edisi Tujuh, Erlangga, Jakarta.
- Kasiram, M. 2008.** *Metodologi Penelitian*. UIN-Malang Pers. Malang.
- Mangkunegara. P 2013.** *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan.*:PT Remaja Rosdakarya. Bandung.

- Maria Goretti Wi Endang Np.**2016. [Pengaruh Tingkat Inflasi, Economic Growth, dan Tarif Pajak terhadap Penerimaan Pajak di Negara-negara Asia \(Studi pada World Bank Periode 2005-2014\)](http://www.neliti.com/journals/jurnal-mahasiswa-perpajakan) . www.neliti.com/journals/jurnal-mahasiswa-perpajakan .
- Morrison, T.** 2001. *Actoinable Learning - Handbook for Capacity Buildingthrough Case Based Learning*. ADB Institute.
- Mulyadi.** 2013. *Sistem Akuntansi*. Salemba Empat. Jakarta.
- Nugroho, A.** 2009. *Audit Internal dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Inter nPenjualan Ekspor*. Universitas Widyatama: Bandung
- Pramudyo, C.** 2007. *Cara Pinter Jadi Trainer*. Percetakan Galang Press. Jakarta.
- Sopiah.** 2008. *Perilaku Organisasi*. Andi Offset. Yogyakarta.
- Soeprapto, R.**2010. *Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah Menuju Good Governance* . World Bank.
- Sugiyono.** 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Afabeta. Bandung.
- Sunyoto, D.** 2012. *Dasar-dasar manajemen pemasaran, Cetakan Pertama*, Caps, Yogyakarta.
- Rizki Yudhi Dewantara.**2016. [Gap Analysis \(Tax Gap\) Of Land And Building Tax Of Urban And Rural Sector \(Pbb P2\) Revenues In Kediri City](http://www.neliti.com/journals/jurnal-mahasiswa-perpajakan) www.neliti.com/journals/jurnal-mahasiswa-perpajakan. Diakses 25 November 2018.
- Rosalita Rachma Agusti.**2016. [Pengaruh Implementasi Sistem Elektronik Bagi Wajib Pajak terhadap Kualitas Pelayanan Administrasi Perpajakan \(Studi pada Wajib Pajak Terdaftar di Kpp Pratama Malang Utara\)](http://www.neliti.com/journals/jurnal-mahasiswa-perpajakan) www.neliti.com/journals/jurnal-mahasiswa-perpajakan. Diakses 25 November 2018.
- Todaro Michael,** 2004. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*.
- Tuanakotta, T, M.** 2010. *Akuntansi Forensik dan AuditorInvestigatif*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPFE UI). Edisi ke 2: Jakarta.. Diakses 25 November 2018.
- Wungu & Brotoharsojo.** 2003. *Tingkatkan Kinerja Perusahaan dengan Merit System*. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Yudha Alief Aprilian.**2014. *Analisis Potensi Penerimaan dan Efektivitas Ppn Atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas terhadap Penerimaan Ppn*. www.neliti.com/journals/jurnal-mahasiswa-perpajakan. Diakses 25 November 2018.